

**PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA BMT AL-IQTISHADY PAGESANGAN MATARAM**



oleh

Siti Rauhun

NIM. 190502099

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA BMT AL-IQTISHADY PAGESANGAN MATARAM**

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



oleh

Siti Rauhun

NIM. 190502099

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Siti Rauhun, NIM: 190502099 dengan judul "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada BMT Al-Istishady PAGESANGAN MATARAM" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: . . . 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Ma'ruf S.H., M.Ag.
NIP. 196505141997031003


Didi Swardi M. Sc.
NIP. 0825088501

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, . . ., 2023

Hal : Ujian Skripsi

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di Mataram**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Di sampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Raulun
NIM : 190502099
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di Munaqasyahkan.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pembimbing I,



Drs. Ma'ruf S.H., M.Ag.
NIP. 196505141997031003

Pembimbing II,



Didi Suwardi M. Sc
NIP. 0825088501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahun
NIM : 190502099
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.



Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Siti Rahun, NIM: 190502099 dengan judul "Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada BMT Al-Iqtishady PAGESANGAN MATARAM" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 5 Oktober 2023.

Dewan Penguji

Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Didi Swardi M. Sc.
(Sekretaris Sidang/ Pemb. II)

Dr. Erna Yanuarni, M.Si
(Penguji I)

Din Hary Fitriadi, M.Ag
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”.¹

(Q.S Al-Baqarah: 286)



Perpustakaan UIN Mataram

¹ (Q.S Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

"Kupersembahkan skripsi ini untuk ibuku Huriyah dan Bapakku H. Abdurrahim, kakakku Muhammad Isnaini, adekku Siti Maryam, keluarga besarku, almamaterku, semua guruku, dan dosenku."



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Bapak Drs. Ma'ruf. S.H., M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Bapak Didi Suwardi M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis, serta seluruh dosen jurusan perbankan syariah UIN Mataram
2. Bapak Dr. Sanurdi, M.S.I selaku ketua jurusan dan Bapak Imronjana Syapriatma, M.S.I selaku wakil sekretaris jurusan Perbankan Syariah UIN Mataram
3. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag. Selaku Rektor UIN Mataram
4. Bapak Dr. Ridwan Mas'ud, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram
5. Syukriati, M.HUM selaku wali dosen kelas C Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kami selama melakukan studi Universitas Islam Negeri Mataram
6. Untuk diriku sendiri terimakasih telah berjuang sampai di titik ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan dalam keadaan mental yang sehat.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajarkan disiplin ilmu pengetahuan, membimbing, membantu penulisan dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Mataram. Semoga ilmu yang telah diajarkan berkah dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan masyarakat, agama dan bangsa pada umumnya. Aamiin
8. Kepada kedua orangtuaku Ibu Huriyah dan Bapak H. Abdurrahim Sidik serta kakak ku Muhammad Isnaini dan adik ku Siti Maryam beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan dan doa-doa dalam setiap langkah kesuksesanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Pemilik NIM. 190502127 terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Dinda, Suhaeni, dan Maeda terimakasih sudah termasuk dari bagian proses skripsi ini
11. Dan semua pihak yang membantu yang tidak dapat saya sebutkan semuanya satu persatu yang juga telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga amal kebaikan dari semua pihak yang membantu penullis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dunia. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi alam semesta. *Aamiin.*



Mataram, 1 Mei 2023

Penulis

Perpustakaan UIN Mataram

Siti Rahun

NIM. 190502099

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat	5
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	16
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22
1. Sejarah Singkat Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram	22
2. Letak Geografis Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram	23
3. Visi dan Misi	23
4. Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram	24
5. Produk dan Jasa BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram	25

B. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.....	30
C. Kendala Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram	37
B. Kendala Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram	40
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
DOKUMENTASI	47
LAMPIRAN	49



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 1.1 Jumlah Anggota Penabung Tahun 2020-2023
Diagram 2.2 Jumlah Anggota Pembiayaan Tahun 2020-2023



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Table 1.2	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Table 1.3	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram
- Gambar 1.2 Dokumentasi Foto
- Gambar 1.3 Dokumentasi Foto



Perpustakaan UIN Mataram

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BMT AL-IQTISHADY PAGESANGAN MATARAM

Oleh:
Siti Rauhun
NIM. 190502099

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip GCG dan kendala penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram pada BMT Al-Iqtishady dalam menjalankan operasionalnya dengan cara menerapkan 5 prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. (2) Kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram. Untuk kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip GCG adalah tampak pada kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman SDM tentang prinsip-prinsip GCG. Selain itu, kedisiplinan karyawan yang naik turun serta belum adanya aturan hukum terkait pelaksanaan GCG pada koperasi.

Kata Kunci: BMT, GCG, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan GCG sangat diperlukan oleh semua entitas bisnis. Hal ini sangat penting karena mnyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam suatu perusahaan. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip GCG akan berdampak pada terjadinya manipulasi informasi yang oleh perusahaan. Perusahaan atau entitas bisnis wajib menerapkan praktik GCG. Hal ini diperkuat dengan terbitnya pedoman umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governannce (KNKG) yang mewajibkan setiap organisasi untuk menerapkan praktik GCG.²

Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder non pemegang saham.³

BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil yaitu, lembaga ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan

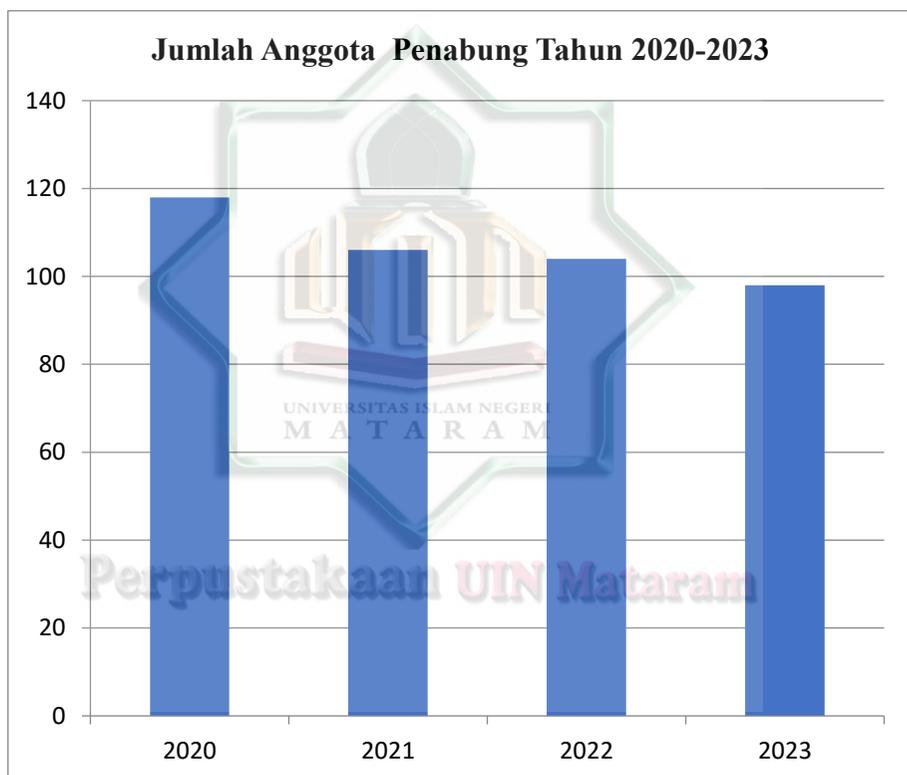
² Gusti Ayu Asri Pramesti dan Daniel Raditya Tandio, "Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Koperasi di Kota Denpasar", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 8, Nomor 2, September, 2018, hlm. 55.

³ M. Sidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11, Nomor. 2, November 2018, hlm. 260.

menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁴ BMT Al-Iqtishady merupakan salah satu BMT yang saat ini sedang dikembangkan di unit bisnis inti Simpan Pinjam, Unit Usaha Keuangan Syariah dan unit Baitul Maal Iqtishady.

Jumlah anggota BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram dapat diketahui data sebagai berikut:

Diagram 1. 1
Jumlah Anggota Penabung Tahun 2020-2023



Sumber: Data Olahan Tahun 2020-2023

⁴ Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 473-474.

Diagram 1. 2
Jumlah Anggota Pembiayaan Tahun 2020-2023



Sumber: Data Olahan Tahun 2020-2023

Dari diagram batang di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dari aspek penyaluran dana (Pembiayaan syariah) jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota dilihat dari kegiatan penghimpunan dana (Produk tabungan).⁵ Dalam menjalankan usahanya, BMT sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat dalam menerima pendanaan, menyalurkan dalam bentuk dana atau keahlian mengelola margin dan bagi hasil untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Untuk itu, kita harus mengupayakan tata kelola yang transparan dan kinerja yang stabil. Di era persaingan memperebutkan pangsa pasar yang semakin ketat ini, BMT tidak hanya mengandalkan kualitas produk dan

⁵ Observasi, *Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady*, pada tanggal 28 Maret 2023.

harga yang kompetitif, namun juga di dukung oleh upaya meraih kepercayaan pelanggan melalui peningkatan kualitas layanan dan standarisasi sistem daam suatu perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) prinsip-prinsip GCG antara lain yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Apabila diterapkan dengan sebaik-baiknya maka akan dapat menjamin hak serta melindungi kepentingan semua stakeholder perusahaan. Penerapan prinsip tata kelola yang baik tentunya tidak semudah yang dibayangkan dan dapat dipastikan BMT Al-Iqtishady menghadapi kendala. Permasalahan dalam menerapkan prinsip GCG adalah tampak pada kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman SDM tentang prinsip-prinsip GCG. Selain itu, kedisiplinan karyawan yang naik turun serta belum adanya aturan hukum terkait pelaksanaan GCG pada koperasi. Hal ini yang dapat menjadi salah satu dari hambatan penerapan *Good Governance*. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk mendapatkan manfaat dari penerapan tata kelola yang yang baik. Berdasarkan latar belakang atau permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

- b. Mengidentifikasi kendala penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan antara lain adalah:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berharga khususnya bagi peneliti dan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus memperkuat teori tentang penerapan prinsip GCG dan kendala yang dialami dalam penerapan prinsip GCG pada lembaga keuangan termasuk BMT.

- b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai informasi untuk merapankan prinsip GCG.
- 2) Diharapkan hasil pemikiran ini dapat membantu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan pihak lain yang berkepentingan yang membutuhkan informasi dan menjadi referensi untuk penelitian serupa yang dibahas oleh penulis.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian yang dilakukannya untuk memudahkan pembahasan dan mempermudah pengolahan data. Ruang lingkup penelitian ini adalah penerapan prinsip GCG serta kendala dalam penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

2. Setting Penelitian

Settingan penelitian ini dilakukan di BMT Al-Iqtishady yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 8 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram. Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini selama beberapa bulan, dimulai pada bulan Februari sampai selesai.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu referensi penelitian untuk melihat hasil kajian ilmiah sebelumnya. Penelitian melakukan telaah pustaka pada hasil penelitian sebelumnya, peneliti telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya tentang prinsip GCG antara lain:

1. Ainul Arofah, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi GCG terhadap Kinerja Karyawan di PT. BPRS Tulen Amanah”.⁶ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dari prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran, dan pertanggung jawaban sudah diterapkan dan menyandingkannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dan juga peran pelaksanaan GCG terhadap kinerja karyawan sudah terealisasi dan dirasakan dilihat dari beberapa kriteria yaitu kuantitas kerja, pengetahuan, kerjasama, kreativitas dan inisiatif oleh para karyawan dan para pemangku kepentingan.

Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai GCG, perbedaan penelitian ini yakni penulis berfokus pada implementasi GCG terhadap kinerja karyawan di PT. BPRS Tulen Amanah. Sedangkan peneliti saat ini pembahasannya berfokus pada penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

2. Imroatus Sholiha, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip GCG di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo”.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan metode keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa KSPPS BMT Salafiyah menerapkan 5 prinsip GCG yaitu transparansi, tanggung jawab, profesionalisme, akuntabilitas, dan kewajaran. Dan untuk kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG, KSPPS BMT Salafiyah mengalami kendala pada faktor internal yaitu pasang surutnya kedisiplinan pegawai untuk datang ke kantor sebelum jam 8.

⁶ Ainul Arofah, “Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Karyawan di PT. BPRS Tulen Amanah”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*. Agustus 2020.

⁷ Imroatus Sholiha, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo”, *Jurnal Lisan Al-Han*, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 161-180.

3. M Shidqon Prabowo, dengan judul “GCG dalam Perspektif Islam”.⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam tentunya harus mengetahui dan memahami prinsip (GCG) yang Islami dalam melaksanakan bisnis. Entitas syariah yang semakin berkembang menuntut para pelaku bisnis menerapkan GCG yang sesuai dengan prinsip syariah. GCG adalah prinsip yang paling populer untuk menjaga integritas organisasi di dunia. Hampir semua negara di dunia teruskan prinsip ini untuk membangun akuntabilitas dan transparansi. Sayangnya dalam kenyataannya, GCG memiliki penafsiran bahwa kurangnya nilai *stakeholder*. Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai prinsip-prinsip GCG. Perbedaan penelitian ini yakni penulis berfokus pada penerapan prinsip-prinsip pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.
4. Ayu Rebut Sri Wahyu Ningseh, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip GCG dalam Perspektif Islam pada Bank Muamalat Indonesia”.⁹ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan GCG dilihat dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, kesetaraan dan kewajiban pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 secara umum cukup baik dan telah sesuai dengan syariat Islam yang ada.

Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai prinsip-prinsip GCG, sedangkan perbedaan penelitian ini yakni penulis berfokus pada penerapan prinsip-prinsip pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.
5. Paat Safaat, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Prinsip GCG Terhadap Kinerja Lembaga Pengelola Zakat (Studi di Baznaz Kabupaten Garut Jawa Barat)”.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian dapat

⁸ M Shidqon Prabowo, “Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTE*. Vol. 11, Nomor 2, November 2018, hlm. 257-270.

⁹ Ayu Rebut Sri Wahyu Ningseh, “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam pada Bank Muamalat Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Bisnis*. Vol. 5, Nomor 2, November 2021, hlm. 18-27.

¹⁰ Paat Safaat, “Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Pengelola Zakat (Studi Di BAZNAZ Kabupaten Garut Jawa Barat)”, (*Skripsi*,

diketahui bahwa lembaga pengelola zakat menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan kegiatannya, menyediakan informasi yang relevan tepat waktu, jelas dan mudah diakses oleh muzaki. Menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab semua karyawan secara jelas, melakukan pengawasan terhadap kemampuan, tugas dan tanggung jawab semua karyawan serta melakukan pembinaan manajemen yang profesional. Menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan cara mematuhi peraturan perundang-undangan, sadar akan tanggung jawab sosial, menjaga profesionalisme dan mematuhi standar etika. Prinsip independensi tidak diterapkan secara baik, karena di dalam melaksanakan kegiatannya masih dipengaruhi oleh pihak luar. Prinsip kewajaran di BAZNAZ Kabupaten Garut tidak diterapkan secara baik, kurang memberikan kesempatan kepada muzaki untuk menyampaikan ide dan pendapatnya demi kepentingan lembaga.

Kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai prinsip GCG. Sedangkan perbedaan penelitian ini yakni penulis berfokus pada pengaruh prinsip GCG terhadap kinerja lembaga pengelola zakat (Studi di Baznaz Kabupaten Garut Jawa Barat). Sedangkan penelitian saat ini, penulis berfokus pada penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang berkaitan dengan *corporate governance* adalah teori agensi. Jensen dan Meckling menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agen*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. *Principal* atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Seorang pemegang saham pada dasarnya menghendaki bertambahnya kemakmuran atau kekayaan, namun

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas pengelolaan perusahaan cenderung melakukan sesuatu yang memaksimalkan kepentingannya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham sehingga hal ini memicu terjadinya masalah keagenan.¹¹

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.¹²

Konsep teori keagenan didasari permasalahan keagenan yang muncul ketika pengurusan perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Perusahaan merupakan peran yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut pengelola perusahaan (*agen*). Adanya dua partisipan tersebut (*principal* dan *agen*) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang peran yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya.

Selain itu, Einsenhartd menjelaskan bahwa teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi kodrat manusia yakni: (1) Manusia biasanya mengutamakan kepentingan diri sendiri (*self-interest*); (2) Manusia mempunyai keterbatasan dalam kemampuan berfikir terkait persepsi di masa depan (*bounded rasonality*); (3)

¹¹ Zaenal Abidin dan Mahelen Prabantarikso, *Konsep dan Penerapan GCG pada Lembaga Keuangan dan BUMN*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 14.

¹² *Ibid.*, hlm. 16.

Manusia selalu cenderung untuk menghindari dari pengambilan resiko (*risk averse*). Oleh karena itu, menurut anggapan tersebut, setiap orang termasuk manajemen perusahaan akan lebih cenderung menjadi oportunist yang mengutamakan kepentingan pribadi. Sebagai agent, manajemen bertanggung jawab secara etis untuk mengoptimalkan kepentingan pemilik (*principal*), dan sebagai gantinya, akan diberi kompensasi yang memuaskan dari manfaat lain (misalnya waktu luang, kondisi menarik, fleksibilitas jam kerja, dll.) yang diperoleh dari hubungan kelembagaan.¹³

Berkaitan dengan masalah teori keagenan ini, *Corporate Governace* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan dapat berfungsi sebagai konsep yang memberikan keyakinan terhadap para investor tentang return atas dana yang telah mereka investasikan ke dalam perusahaan. Menurut Prasetyo (2009), salah satu cara mengurangi konflik keagenan ialah melalui mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Sanjaya dan Christianti (2012) mengemukakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi biaya keagenan. Sejalan dengan penelitian Sudarma dan putra (2014), bahwa penerapan *good corporate governance* yang semakin intensif mampu mengurangi biaya keagenan.

Theory Agency ini mengembangkan adanya hubungan positif antara *shareholder* dengan para manager melalui GCG. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manager. Berdasarkan teori keagenan ini, perusahaan memahami perlunya penerapan GCG dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, untuk meminimalkan kerugian akibat penyalahgunaan hak pengelolaan dalam pengelolaan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan memperoleh reputasi baik perusahaan di mata masyarakat dan calon investor.

¹³ *Ibid.*, hlm. 15.

Dengan adanya GCG, diharapkan pihak manajemen dapat memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan kepentingan pemegang saham.

2. Good Corporate Governance

a. Definisi Good Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* seringkali diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum istilah GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).¹⁴ *Corporate Governance* timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu, dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan.¹⁵ Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*atkeholder*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.¹⁶ Ada berbagai pengertian GCG yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut Cadbury Commitee of United Kingdom, *corporate governance* yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka. Dengan kata

¹⁴ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), hlm. 8.

¹⁵ Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Manado: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), hlm. 14.

¹⁶ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), hlm. 8.

lain, *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.¹⁷

- 2) Menurut Agus dan Ardana tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan dewan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.¹⁸
- 3) Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder non pemegang saham.¹⁹
- 4) Ball dalam Evans, dkk. Mengartikan *corporate governance* sebagai seperangkat kesepakatan atau aturan institusi yang secara efektif mengatur pengambilan keputusan. Lebih jauh Shleifer dan Vishny mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *GCG* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi

¹⁷ Muhammad Tamrin, Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 57.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 57-58.

¹⁹ M. Sidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11, Nomor 2, November, 2018, hlm. 260.

para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar.²⁰

b. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Pada dasarnya, inti dari menjalankan bisnis meningkatkan kinerja perusahaan dengan memantau atau memantau kinerja dan akuntabilitas manajemen administrasi kepada pemangku kepentingan lainnya, dalam kerangka peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tujuannya adalah perusahaan yang baik tujuan pengelolaan adalah menciptakan nilai tambah semua pihak yang berkepentingan. Berpesta ini adalah pihak internal yang mencakup dewan, direksi, karyawan dan pihak ketiga, termasuk investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lainnya, pihak yang berkepentingan (kelompok kepentingan). Secara khusus, banyak tujuan pemerintahan yang baik adalah:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tahan sebuah organisasi yang mempromosikan menciptakan kesejahteraan pemegang saham dan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya dan inilah solusinya elegan untuk menghadapi tantangan organisasi sebelum
- 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola secara terbuka, adil dan bertanggung jawab
- 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban anggota pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Diperlukan dua aspek untuk menyeimbangkan yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan batin. Hal ini dilakukan dengan memberikan informasi yang bermanfaat penilaian kinerja memiliki informasi sumber daya perusahaan memiliki semua transaksi dan peristiwa internal dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sebaliknya Penyeimbangan eksternal dilakukan dengan penyerahan informasi bisnis bagi pemegang saham, kreditor, bank, dan

²⁰ Sutedi Adrian, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

organisasi lain yang berkepentingan. Untuk memahami kedua aspek keseimbangan ini Praktik bisnis yang baik memiliki beberapa prinsip dasar pengelolaan Berdasarkan pedoman umum perusahaan yang baik Pemerintah Indonesia, Komite Nasional Kebijakan manajemen KNKG adalah 5 prinsip perusahaan yang baik pengelolaan Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan dan kesetaraan.²¹

Berikut prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik meliputi:

a) Transparansi (*Transparency*)

Mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi berarti tidak hanya menjaga objektivitas, tetapi juga mengungkapkan hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang, tetapi juga hal-hal penting bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham dan kreditur untuk mengambil keputusan secara akurat dan cepat. Tanpa mengurangi kewajiban kami untuk melindungi informasi rahasia.

Dalam pedoman pelaksanaannya, asas transparansi berarti bahwa Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kemudian ditegaskan bahwa Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta

²¹ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Government Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Manado: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), hlm. 21.

tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar penerapan GCG mengandung makna bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan prinsip dasar ini, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan juga harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.²²

c) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Dalam pelaksanaannya, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Juga, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan

²² Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Manado: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), hlm. 24-25.

dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.²³

d) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.²⁴

e) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

²³ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Industry Manufaktur Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 64.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

Pedoman pokok pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- (1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- (2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu, perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.²⁵

c. Tujuan Good Corporate Governance

Adapun tujuan dari penerapan GCG menurut KNKG adalah sebagai berikut.

- 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilita, independensi dan *fairness*.
- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan RUPS.
- 3) Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 64-65.

- 6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.²⁶
- d. Tahap- Tahap Penerapan Good Corporate Governance

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahanan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pertahanan beriku.²⁷

1) Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas tiga langkah utama , yaitu 1) *awareness building*, 2) *GCG assessment*, dan 3) *GCG manual building*. *Awareness building* merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. *GCG assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain *GCG assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang

²⁶ Rani Siti Fitriani, *Kajian Good Corporate Governance dan Penerapan Sanksi Koperasi*, (Bandung: CV. Semiotika, 2019), hlm. 28-29.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

dapat diambil untuk mewujudkannya. *GCG manual building* adalah langkah berikut setelah *assessment* dilakukan.

Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti.

- a) Kebijakan *good corporate governance* perusahaan,
- b) Pedoman *good corporate governance* bagi organ-organ perusahaan
- c) Pedoman perilaku,
- d) Audit committee charter,
- e) Kebijakan disklosur dan transparansi,
- f) Kebijakan dan kerangka manajemen risiko, dan
- g) Roadmap implementasi.²⁸

2) Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu (1). Sosialisasi, (2) implementasi, dan (3) internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai *GC champion* di perusahaan. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmap yang disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya, prosedur pengadaan), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekadar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.²⁹

3) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan skoring. Evaluasi dalam bentuk assesment, audit 'scoring' juga dapat dilakukan secara mandatori misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Pelaksanaan GCG yang berkaitan dengan pengembangan sistem, diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan yang pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

- a) Menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas;
 - b) Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*check and balance*);
 - c) Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan
 - d) Maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - e) Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan;
 - f) Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil (*fair*) dan setara di antara para pemegang saham; dan
 - g) Membangun sistem pengembangan sdm, termasuk pengukuran kinerjanya.³⁰
- e. Landasan Peraturan Penggunaan GCG pada Koperasi

Sebagai organisasi yang telah ditetapkan menjadi badan hukum sah seperti yang tertera pada Undang-sundang UU RI No mor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian diharapkan koperasi akan menjadi lebih baik lagi dalam perkembangannya sesuai dengan harapan Bangsa Indonesia. Namun sayangnya hingga kini belum ada peraturan tetap dari pihak regulator mengenai kejelasan atau penggunaan GCG pada koperasi. Untuk itu, regulator dalam hal ini kementerian koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep GCG.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

³⁰ *Ibid.*, hlm. 30-31.

³¹ Gusti Ayu Asri Pramesti dan Daniel Raditya Tandio, "Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Koperasi di Kota Denpasar", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 8, Nomor 2, September, 2018, hlm. 56 -57.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, konsep, karakteristik, gejala maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.³² Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang bukan bersifat angka atau nominal tertentu, tetapi lebih berbentuk kalimat pernyataan uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalan data khas kualitatif yaitu wawancara, observasi dan lain sebagainya. Maka disini peneliti akan mendeskripsikan masalah tentang penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi lapangan sebagai sarana untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk dalam penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

3. Sumber Data

a. Sumber Data

Dalam jenis sumber data penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1) Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.³³ Sebagai contoh, penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan tentang penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung, melainkan sumber

³² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

³³ Sugiono, *“Metode Penelitian”*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 256.

sudah dibuat oleh orang lain. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh melalui dokumen ataupun buku yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi:³⁵

1) *Participant Observation*

Participant Observation (Observasi berperanserta), dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian.³⁶

2) *Non Participant Observasi*

Observasi non participant adalah dimana peneliti tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objeknya. Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat aktif dan hanya sebagai pengamat independen.³⁷

Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah *Non Participant Observation*, karena peneliti tidak terlibat aktif dalam penelitian, peneliti tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti langsung ke lokasi untuk menemukan permasalahan yang terjadi. Objek yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip GCG pada BMT A-Iqtishady Pagesangan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 276.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 233.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 311.

³⁷ *Ibid.*

Mataram dan apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, yang dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, dan perasaan secara natural. Ada beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan tidak terstruktur.³⁸

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

2) Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang dimana pihak diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3) Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 472-473.

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, karena penelitian ini telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Tujuan dari wawancara ini untuk mengumpulkan data mengenai penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh, mengumpulkan data-data melalui tulisan-tulisan atau bahan tertulis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan variable penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memanfaatkan arsip atau data-data yang ada di BMT Al-Iqtishady yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data Bogdan salam dan Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistemastik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁹ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisi data melalui redudksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246.

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁰

b. *Data Display* (Penyajian data)

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengemalihan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis metrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang menganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin berguna.

c. *Conclusion Drawing* (Menarik kesimpulan/verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴¹

6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan *ujiconfirmability*. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 247.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 525.

keabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, keatasan yang menugasi, dan keteman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.⁴²

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁴³

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengecekan kembali informasi melalui tahap observasi,

⁴² *Ibid*, hlm. 274.

⁴³ *Ibid*, hlm. 274.

wawancara maupun dokumentasi kepada informan.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

Diawali dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama pada tingkatan mikro dan kecil di wilayah NTB khususnya pulau Lombok, maka munculah pemikiran untuk membuat suatu organisasi ekonomi yang bisa membantu meringankan beban tersebut. Pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2010 di gedung Pasar Ikan Higenis Kebon Roek Mataram berlangsung pertemuan beberapa orang untuk menindaklanjuti pemikiran tersebut. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa akan dibentuk lembaga ekonomi umat yang dapat membantu meringankan beban masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan mikro dari jeratan rentenir yang sudah berakar di masyarakat.

Pada tanggal 18 Juni 2010 berlangsung pertemuan lanjutan untuk membahas jenis organisasi yang akan digunakan serta struktur organisasinya. Pada saat itu disepakati organisasi tersebut berbentuk lembaga keuangan mikso dan disepakati namanya LKM BMT Al-Iqtishady dengan 2 orang pengelola pada tahap rintisannya itu yakni Muh Nasir Jailani dan Muhamad Syafarwadi. Konsep Baitul Mal Wat Tamwil dipilih menjadi konsep operasional karena konsep ini dirasa paling cocok dan lengkap untuk menjadi pendukung perbaikan dan perkembangan ekonomi umat. Pada tahap rintisan ini disepakati sector Tamwil mampu menghasilkan keuntungan yang bisa diberdayakan untuk program Baitul Maal karena penyisihan keuntungan dari sector Tamwil akan dijadikan sumber pendanaan Baitul Maal pada awal operasionalnya nanti.

Namanya Al-Iqtishady dipilih karena disesuaikan dengan tujuan terbentuknya lembaga ini yaitu pemberdayaan ekonomi, Iqtishady berarti ekonomi. Diharapkan anggota-anggota yang tergabung dalam BMT Al-Iqtishady memiliki ekonomi yang lebih berdaya dari sebelumnya. Kemudian tanggal 18 Juni 2010 ditetapkan sebagai hari lahirnya BMT Al-Iqtishady. Mulai hari itu LKM BMT Al-Iqtishady resmi beroperasi dengan dana awal RP

12.500.000, dengan fasilitas hanya buku kas dan lembaran kwitansi, tanpa peralatan yang lain dan juga tanpa kantor, dan seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit kami resmi menjadi lembaga yang profesional.⁴⁴

2. Letak Geografis Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

Kondisi BMT Al-Iqtishady cukup memadai sebagai lembaga keuangan syariah dilihat dari kondisi fisik gedung yang dimiliki berlantai dua. Lantai pertama terdiri dari ruangan customer service, pendanaan dan pembiayaan. Sedangkan dilantai dua terdiri dari mushalah, ruang RAT, ruangan manager umum dan manager USPPS. Letak gedung ini sangat strategis karena lokasi yang berada di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.8 Pagesangan Mataram dipinggir jalan dan dekat dengan pasar tradisional yang merupakan tempat masyarakat melakukan bisnis sehari-hari seperti jual beli.

3. Visi Dan Misi

Adapun visi dan misi dari BMT Al-Iqtishady adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi koperasi yang Istiqomah dan Amanah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah serta senantiasa meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat yang relevan dengan kondisi zaman.

b. Misi

- 1) Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat yang berkesinambungan.
- 2) Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota dan masyarakat.
- 3) Berkontribusi dalam perkembangan perkoprasian dan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia.
- 4) Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

⁴⁴ Web Resmi, <https://www.bmtalqitshady.com/692-2/>, di akses pada Tanggal 7 April 2023.

- 5) Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha di kalangan anggota dan masyarakat.⁴⁵
4. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram
- Berikut adalah gambar struktur organisasi BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.⁴⁶



Gambar 1.1
Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

5. Produk dan jasa Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram
- KSU BMT Al-Iqtishady memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan kepada anggota diantaranya adalah produk tabungan dan produk pembiayaan.

⁴⁵ *Dokumentasi*, Visi Misi BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram, Tanggal 6 Maret 2023.

⁴⁶ *Dokumentasi*, Gambar Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram. Tanggal 31 Maret 2023.

a. Produk Tabungan di KSU BMT Al-Iqtishady

1) Tabungan Iqtishady

Tabungan Iqtishady adalah jenis tabungan pada umumnya, dimana nasabah bisa menabung kapan saja dan bisa diambil kapan saja dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku. tabungan ini menggunakan akad wadi'ah (titipan).

2) Tabungan Haji & Umrah

Tabungan Haji & Umrah merupakan tabungan yang diperuntukkan dan atau diniatkan untuk ibadah umrah/haji. tabungan dapat diambil pada saat nasabah akan menjalankan ibadah umrah/haji atau pada saat jatuh tempo. tabungan dapat diambil berupa dana sebesar tabungan pokok. Tabungan ini menggunakan akad wadi'ah (titipan).

3) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi persiapan qurban. tabungan dapat diambil pada saat peserta menjalankan ibadah qurban atau pada saat jatuh tempo. kami dapat memberikan pelayanan pengadaan hewan qurban baik secara berkelompok maupun individu. tabungan ini menggunakan akad wadi'ah (titipan).

4) Siswa Mandiri

Tabungan siswa mandiri merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk mempersiapkan kebutuhan biaya pendidikan. contoh pembayaran spp dan berbagai kebutuhan pendidikan lainnya. jika sebagai perorangan, tabungan siswa mandiri akan diberikan setiap 6 bulan dan atau setiap ajaran baru satu (1) tahun sesuai kesepakatan, jika mengatas namakan sekolah, pihak sekolah dapat mengumpulkan secara kolektif. tabungan ini menggunakan akad wadi'ah (titipan).

5) Tabungan Aqiqah

Tabungan aqiqah merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk mempersiapkan ibadah aqiqah. tabungan dapat diambil pada saat nasabah akan menunaikan aqiqah atau pada saat jatuh tempo. tabungan ini menggunakan akad wadi'ah (titipan).

6) Tabungan Walimah

Tabungan Walimah merupakan tabungan untuk mempersiapkan pernikahan, tabungan dapat ditarik pada saat menjelang pernikahan atau setelah melakukan proses lamaran (khitbah). tabungan ini menggunakan akad wadiah (titipan).

7) Tabungan Ibu Siaga

Tabungan Ibu siaga merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi para ibu-yang sedang merencanakan untuk mempunyai momongan. tabungan ini dapat diambil pada saat yang bersangkutan sedang berada di rumah persalinan dan atau pada saat menjelang melahirkan. tabungan ini menggunakan akad wadiah (titipan).

8) Tabungan Lebaran

Tabungan Lebaran merupakan tabungan untuk persiapan menyambut lebaran (idul fitri & idul adha). Tabungan ini dapat diambil oleh peserta pada saat menjelang lebaran (5 hari sebelum hari H). Tabungan ini menggunakan akad wadiah (titipan).

b. Produk Pembiayaan di BMT Al-Iqtishady

1) Pembiayaan Barang & Jasa

Pembiayaan barang dan jasa merupakan produk pembiayaan BMT Al-Iqtishady untuk sector produktif usaha mikro baik berbentuk badan usaha maupun perseorangan.

Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a) Membayar sewa ruang usaha, kendaraan dll.
- b) Membiayai perbaikan fasilitas usaha.
- c) Membeli fasilitas usaha/alat produksi dll.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Merupakan produk pembiayaan BMT Al-Iqtishady untuk sektor produktif usaha mikro dan kecil (UMK) yang sudah berjalan minimal 2 tahun dengan pembiayaan maksimal rp 50 juta untuk kegunaan penambahan modal kerja. pola pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah, dengan akad jual beli (Murabahah), Sewa (Ijarah), Mudharabah Atau Musyarakah.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif untuk berbagai keperluan pribadi dan keluarga anda yang bersifat non- produktif.⁴⁷ Produk pembiayaan tersebut memiliki beberapa macam akad sesuai kebutuhan anggota, yaitu:

a) Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana 100% modal, sedangkan pihak lainnya jadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan sesuai perjanjian kontrak, sedangkan kalau rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan kelalaian dari pihak pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b) Akad Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan.

c) Akad Musyarakah

Akad musyarakah yaitu pembiayaan di mana pihak koperasi syariah dan anggota sama-sama memiliki kontribusi dana dalam usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada nisbah (bagi hasil) yang disepakati anggota dan pengelola.⁴⁸

d) Akad Qadrul Hasan

Akad qadrul hasan adalah pemberian harta benda orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali

⁴⁷ Web Resmi, <https://www.bmtaliqtishady.com/692-2/>, di akses pada Tanggal 5 April 2023.

⁴⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 65.

sesuai dengan jumlah yang di pinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalana yang diminta oleh pihak bank.⁴⁹

e) Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁵⁰

B. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

BMT Al-Iqtishady merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang memberikan jasa pelayanan perkoprasian serba usaha di Kota Mataram. Penerapan dasar GCG dapat dikatakan baik jika terdapat Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*). Prinsip inilah yang diterapkan oleh BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram dalam mengelola perusahaan secara professional. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di BMT Al-Iqtishady maka dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady sebagai berikut:

1) Prinsip Transparansi

Mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi berarti tidak hanya menjaga objektivitas, tetapi juga mengungkapkan hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang, tetapi juga hal-hal penting bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham dan kreditur untuk mengambil keputusan secara akurat dan cepat.⁵¹ Adapun penerapan transparansi pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram meliputi:

a. Transparansi atas Informasi yang Terkait dengan Perusahaan

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 95.

⁵⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 79.

⁵¹ Rinitami Njatriani, Bagus Rahmanda dan Reyhan Dewangga Saputra, "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Nomor 2, Oktober-November 2019, hlm. 250.

BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT menyediakan layanan tatap muka yang dilayani langsung oleh *Customer Service* pada waktu jam kerja. Selain itu, untuk mendapatkan informasi terkait BMT Al-Iqtishady, para pengguna informasi dapat mencarinya melalui *Website* resmi perusahaan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan mudah mengakses informasi sesuai dengan haknya. Adapun informasi yang dapat diakses melalui *Website* resmi perusahaan yakni produk, visi-misi, simulasi pembiayaan, lelang asset, jenis-jenis zakat dan waktu membayarnya. Tidak berhenti disitu, BMT juga membentuk WA (*Whatsapp*) grup khusus anggota supaya informasi bisa tersampaikan dengan mudah.

b. **Transparansi atas Informasi yang Terkait dengan Keuangan Anggota**

Transparansi yaitu keterbukaan BMT dalam memberikan informasi yang menyangkut material yang relevan dalam proses pengambilan keputusan *stakeholder*. Untuk itu diperlukan informasi atas laporan keuangan pada BMT Al-Iqtishady PAGESANGAN MATARAM.

Wawancara dengan Ibu Sundusiah selaku anggota *Customer Service* BMT Al-Iqtishady.

“Berbicara mengenai transparansi, BMT Al-Iqtishady sudah memberikan keterbukaan dalam artian misalkan ada anggota yang mau menyimpan dananya di sini, ada memang sebagian-sebagian yang untuk produk simpanan itu yang sistemnya, yang pertama produk simpanan yang memang kita *pure* untuk menggunakan akad titipan otomatis dia tidak mendapatkan bagi hasil, cuman ada memang nasabah yang mempunyai jumlah dana yang cukup besar, misalkan permintaan dari setiap nasabah misalkan dia punya dana sampai 200.000.00 juta, yang 200.000 juta ini dia simpan dalam artian kalau memang ada anggota yang melakukan pembiayaan bisa menggunakan dana itu tapi dengan syarat harus ada persetujuan dari yang punya dana, jadi tidak langsung

kita pakai otomatis harus kita transparan ke dia entah dananya digunakan untuk apa, nilainya seberapa dan dia dapatnya seberapa”.⁵²

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Berdasarkan prinsip dasar ini, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan juga harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.⁵³ BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT bertanggung jawab penuh pada pekerjaan yang diberikan. Adapun peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 20/Per/M. KUM/ IX/ 2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Adapun penerapan akuntabilitas pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram antara lain:

a. Akuntabilitas atas Pertanggung jawaban Organisasi

Ketika anda mendapatkan tanggung jawab, anda dituntut untuk memiliki akuntabilitas, anda memiliki dorongan dalam diri untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut.

Wawancara dengan Ibu Sundusiah selaku *Customer Service* di BMT Al-Iqtishady.

“Dilihat dari prinsip akuntabilitas ini perusahaan atau lembaga pastinya mempunyai rincian tugas dan tanggung jawab, seperti di bagian *Customer Service* tugasnya apa, pendanaan bagiannya apa dan memang semua karya harus menjalankan sesuai tupoksi masing-masing. Kita juga bisa saling membantu sesama anggota dengan catatan tugas kita sendiri sudah selesai, misalkan saya di bagian *Customer Service* membantu dibagian

⁵² Sundusiah. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 29 Maret 2023. 10:00.

⁵³ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Government Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Manado: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), hlm. 24-25.

pendanaan walaupun pengetahuan saya tidak banyak.⁵⁴ BMT Al-Iqtishady menyadari bahwa prinsip akuntabilitas mewajibkan seluruh pimpinan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, manajemen telah memiliki rincian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan BMT Al-Iqtishady. Adapun mengenai isi visi misi dan tujuan BMT Al-Iqtishady.

- 1) Visi: Visi koperasi menjadi koperasi yang istiqomah dan amanah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah serta senantiasa meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat yang relevan dengan kondisi zaman.
- 2) Misi: Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat yang berkesinambungan, berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota dan masyarakat, berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia, mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip tata pengelolaan perusahaan yang baik, menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha di kalangan anggota dan masyarakat.
- 3) Tujuan: Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan.⁵⁵

3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam

⁵⁴ Sundisiah. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 29 Maret 2023. 10:00.

⁵⁵ Web Resmi, <https://www.bmtaliqtishady.com/692-2/>, di akses pada Tanggal 18 September 2023.

jangka panjang.⁵⁶ Adapun penerapan tanggung jawab pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram antara lain:

- a. Tanggung jawab atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam mengelola perusahaan harus memperhatikan aspek kepatuhan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wawancara dengan Ibu Arfianil selaku *Teller* pada BMT Al-Iqtishady.

“Beliau mengatakan bahwa hal yang dilakukan BMT Al - Iqtishady dalam menerapkan prinsip ini adalah dalam operasionalnya BMT mempunyai legalitas hukum dan patuh terhadap aturan-aturan dinas koperasi dengan cara melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Jadi BMT Al-Iqtishady rutin melakukan RAT setiap tahun. Adapun isi rangkaian kegiatan RAT yaitu penyampaian laporan pertanggung jawaban dewan pengurus serta rencana kerja tahun buku 2023, Laporan pertanggung jawaban dari dewan pengawas manajemen, dan laporan pertanggung jawaban dari Dewan Pengawas Syariah. Laporan pertanggung jawaban pengurus disampaikan oleh bendahara sekaligus manajer keuangan BMT Al-Iqtishady Bpk. Muhamad Syafarwadi, SE. Beliau memaparkan secara rinci terkait dengan perjalanan dari unit-unit usaha yang dijalankan oleh BMT Al-Iqtishady selama satu tahun. Selanjutnya laporan pertanggung jawaban dari dewan pengawas manajemen disampaikan oleh Bpk. Gunadi Widyatmoko, SE dan laporan pertanggung jawaban dewan pengawas syariah disampaikan oleh Ust Ahmad Tauhid, ME selaku Ketua DPS.⁵⁷

4. Prinsip Independensi (*Independency*)

⁵⁶ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dakan Industry Manufaktur Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 64.

⁵⁷ Arfianil. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 5 Juni 2023. Pukul 10:00.

Dalam koperasi kemandirian merupakan salah satu prinsip koperasi yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian yang harus dijalankan oleh setiap jenis koperasi apapun. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independensi sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.⁵⁸ Untuk mencapai kemandirian, perusahaan perusahaan wajib memastikan bahwa:

- a. Setiap organ perusahaan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang teruatdalam anggaran dasar, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Pencegahan terjadinya dominasi atau intervensi/tekanan antar organ dan oleh pihak-pihak lain, saling lempar tanggung jawab, pengaruh kepentingan tertentu dan benturan kepentingan, sehingga pengambilan keputusan terlaksana secara objektif dan profesional. Adapun penerapan Independensi pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram antara lain:

- 1) Independensi atas Pelaksanaan Tugas Sesuai Tanggung Jawab

Kemandirian maksudnya koperasi harus berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Kemandirian juga bisa diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan berani bertanggung jawab terhadap perbuatan, serta berkehendak untuk mengelola diri sendiri.

Wawancara dengan Ibu Sundusiah selaku CS, beliau mengatakan bahwa:

“Pada BMT Al-Iqtishady dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan SOP yang ada dan semua karyawan bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing seperti di bagian *Customer Service* tugasnya apa, pendanaan bagiannya apa dan

⁵⁸ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dakan Industry Manufaktur Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 64.

memang semua karyawan harus menjalankan kegiatannya sesuai tupoksi masing-masing. Adapun mengenai lempar tanggung jawab disini tidak sepenuhnya dalam artian kita bisa saling membantu sesama anggota dengan catatan tugas kita sendiri sudah selesai, misalkan di bagian *Customer Service* membantu dibagian pendanaan walaupun memiliki pengetahuan yang tidak banyak”.⁵⁹

5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu, perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.⁶⁰ Berikut penerapan kewajaran pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram adalah sebagai berikut:

1) *Fairness* atas Perlakuan Anggota

⁵⁹ Sundisiah. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 29 Maret 2023. 10:00.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 64-65.

Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.⁶¹ Perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan.

Wawancara dengan Bapak Fauzi Selaku Pendanaan BMT Al-Iqtishady.

“BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT selalu memberikan pelayanan yang sama kepada semua anggota yang ada tanpa membedakan antara anggota yang satu dengan yang lainnya mengenai hak anggota. Dalam prinsip ini harus setara dalam segala hal, baik itu dari pelayanan anggota atau pun perlakuan kepada sesama anggota.⁶²

Dalam koperasi hak-hak anggota koperasi tercantum dalam pasal 6 Keputusan Pengurus Nomor 01/KEP/Kop/2021 tentang Peraturan khusus usaha simpan pinjam koperasi.

Adapun hak anggota koperasi adalah sebagai berikut:

- a) menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota
- b) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
- c) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar
- d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta

⁶¹ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dakan Industry Manufaktur Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 64-65.

⁶² Fauzi. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 5 Juni 2023. 10:00.

- e) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
- f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut dalam anggaran dasar.

2) Kesempatan Menyampaikan Pendapat

Dalam koperasi mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat, baik diminta atau tidak diminta yang terdapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoprasian. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Dalam prinsip ini BMT Al-Iqtishady memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Adapun hak untuk bersuara mengemukakan pendapat bisa dilakukan pada saat rapat evaluasi dan RAT yang diadakan setiap tahun.⁶³

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara yaitu, BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram sudah menerapkan prinsip GCG dengan cukup baik dilihat dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.

C. Kendala dalam Prinsip Good Corporate Governance pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

Kendala dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Setiap lembaga tentu memiliki kendala dalam menjalankan operasionalnya, begitu juga di BMT Al-Iqtishady.

⁶³ Arfianil. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 29 Maret 2023. 16:10.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzi selaku manajer pendanaan di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram, beliau menyampaikan:

“Kendala yang dialami BMT Al-Iqtishady selama menerapkan prinsip GCG yaitu tampak pada kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip GCG. Hal ini yang menyebabkan terjadinya masalah dalam penerapannya. Selain itu, kekurangan tenaga kerja yang di mana saya selaku bagian pendanaan yang beranggotakan satu orang mengalami kesulitan saat sedang menjalankan tugas. Hal ini, berkaitan dengan salah satu prinsip GCG yaitu prinsip akuntabilitas.⁶⁴

Wawancara dengan Ibu Sundusiah selaku *Customer Service* BMT Al- Iqtishady Pagesangan Mataram, beliau menyampaikan:

“Bahwa kendala dalam menerapkan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady tampak pada tata tertib dan kedisiplinan karyawan yang naik turun. Hal ini, disebabkan oleh tidak adanya aturan yang pasti yang dapat dijadikan pegangan. Secara tidak langsung ketentuan-ketentuan mengenai GCG pada koperasi ini khususnya belum ada”.⁶⁵

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara yaitu, BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram mengalami kendala di bagian faktor internal yang dimana faktor internya tersebut muncul dari lembaga itu sendiri. Seperti kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman SDM tentang prinsip-prinsip GCG dan tata tertib dan kedisiplinan karyawan yang naik turun.

⁶⁴ Fauzi. *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram, 30 Maret 2023 Pukul 16:00.

⁶⁵ Sundusiah. *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram, 30 Maret 2023 Pukul 10:00

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

BMT Al-Iqtishady merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang memberikan jasa pelayanan perkoprasian serba usaha di Kota Mataram. Penerapan dasar GCG dapat dikatakan baik jika terdapat Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*). Prinsip inilah yang diterapkan oleh BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram dalam mengelola perusahaan secara profesional. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di BMT Al-Iqtishady maka dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi

Mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi berarti tidak hanya menjaga objektivitas, tetapi juga mengungkapkan hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang, tetapi juga hal-hal penting bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham dan kreditur untuk mengambil keputusan secara akurat dan cepat.⁶⁶ Adapun penerapan Transparansi Pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram meliputi:

a. Transparansi atas Informasi yang Terkait dengan Perusahaan

BMT Al-Iqtishady menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT menyediakan layanan tatap muka yang dilayani langsung oleh Customer Service pada waktu jam kerja. Selain itu, untuk mendapatkan informasi terkait BMT Al-Iqtishady, para pengguna informasi dapat mencarinya melalui *Website* resmi perusahaan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan mudah mengakses informasi sesuai dengan haknya. Adapun informasi yang dapat diakses melalui *Website* resmi perusahaan yakni produk, visi-misi, simulasi pembiayaan,

⁶⁶ Rinitami Njatriani, Bagus Rahmanda dan Reyhan Dewangga Saputra, "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Nomor 2, Oktober-November 2019, hlm. 250.

lelang asset, jenis-jenis zakat dan waktu membayarnya. Tidak berhenti disitu, BMT juga membentuk *Whasapp grup* khusus anggota supaya informasi bisa tersampaikan dengan mudah.

b. Transparansi atas Informasi yang Terkait dengan Keuangan Nasabah

Transparansi yaitu keterbukaan BMT dalam memberikan informasi yang menyangkut material yang relevan dalam proses pengambilan keputusan *stakeholder*. Untuk itu diperlukan informasi atas keuangan anggota pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

Dalam menerapkan prinsip ini BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dengan baik. Bentuk transparansi BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram ini dimana segala bentuk informasi, baik yang berkaitan dengan perusahaan, laporan keuangan dan bentuk transaksi dengan anggota dalam pelayanan yang diinformasikan dengan baik dan jelas, kecuali mengenai rahasia BMT hanya untuk orang atau lembaga tertentu yang mengetahuinya. Sehingga bentuk dari penerapan transparansi pada BMT Al-Iqtishady sudah dilaksanakan dengan cukup baik, jelas, dan sesuai dengan teori yang ada.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Berdasarkan prinsip dasar ini, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan juga harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.⁶⁷

BMT Al-Iqtishady menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT bertanggung jawab penuh pada pekerjaan yang diberikan. Adapun peraturan Menteri koperasi dan UKM Nomor. 20/Per/M. KUM/ IX/ 2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen koperasi yang lebih

⁶⁷ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Government Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Manado: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), hlm. 24-25.

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, koperasi harus meningkatkan kepercayaan kepada anggota dan masyarakat, untuk itu perlu penerapan akuntabilitas secara tertib dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik.⁶⁸ Adapun penerapan akuntabilitas pada BMT Al-Iqtishady antara lain:

a. Akuntabilitas atas Pertanggungjawaban Organisasi

Pada BMT Al-Iqtishady prinsip akuntabilitas perusahaan atau lembaga pastinya mempunyai rincian tugas dan tanggung jawab, seperti di bagian *Customer Service* tugasnya apa, pendanaan bagiannya apa dan memang semua karyawan harus menjalankan kegiatannya sesuai tupoksi masing-masing. Kita juga bisa saling membantu sesama anggota dengan catatan tugas kita sendiri sudah selesai, misalkan di bagian *Customer Service* membantu dibagian pendanaan walaupun memiliki pengetahuan yang tidak banyak.⁶⁹

3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.⁷⁰ Adapun penerapan responsibilitas pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram antara lain:

a. Responsibilitas atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam mengelola perusahaan harus memperhatikan aspek kepatuhan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang dilakukan BMT Al -Iqtishady dalam menerapkan prinsip ini adalah dalam operasionalnya BMT mempunyai legalitas hukum dan patuh terhadap aturan-aturan dinas koperasi dengan cara melakukan RAT (Rapat

⁶⁸ Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 04/KB/M. KUKM/111/2020 Tentang Kerjasama dalam Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah n.

⁶⁹ Sundisiah. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 29 Maret 2023. 10:00.

⁷⁰ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dakan Industry Manufaktur Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 64.

Anggota Tahunan). Jadi BMT Al-Iqtishady rutin melakukan RAT setiap tahun. Adapun isi rangkaian kegiatan RAT yaitu penyampaian laporan pertanggung jawaban dewan pengurus serta rencana kerja tahun buku 2023, laporan pertanggung jawaban dari dewan pengawas manajemen, dan laporan pertanggung jawaban dari Dewan Pengawas Syariah. Laporan pertanggung jawaban pengurus disampaikan oleh bendahara sekaligus manajer keuangan BMT Al-Iqtishady Bpk. Muhamad Syafarwadi, SE. Beliau memaparkan secara rinci terkait dengan perjalanan dari Unit-Unit Usaha yang dijalankan oleh BMT Al-Iqtishady selama satu tahun. Selanjutnya laporan pertanggung jawaban dari dewan pengawas manajemen disampaikan oleh Bpk. Gunadi Widyatmoko, SE dan laporan pertanggung jawaban dewan pengawas syariah disampaikan oleh Ust Ahmad Tauhid, ME selaku Ketua DPS.⁷¹

4. Prinsip Independensi (*Independency*)

Dalam koperasi kemandirian merupakan salah satu prinsip koperasi yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian yang harus dijalankan oleh setiap jenis koperasi apapun. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.⁷²

Untuk mencapai kemandirian, perusahaan perusahaan wajib memastikan bahwa:

- a. Setiap organ perusahaan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang teruatdalam anggaran dasar, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Pencegahan terjadinya dominasi atau intervensi/tekanan antar organ dan oleh pihak-pihak lain, saling lempar tanggung jawab, pengaruh kepentingan tertentu dan benturan epetingan, sehingga

⁷¹ Arfianil. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 5 Juni 2023. Pukul 10:00.

⁷² Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dakan Industry Manufaktur Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 64.

pengambilan keputusan terlaksana secara objektif dan profesional. Adapun penerapan independensi pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram antara lain:

1) Kemandirian anggota dalam mengelola BMT

Kemandirian maksudnya koperasi harus berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Kemandirian juga bisa diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan berani bertanggung jawab terhadap perbuatan, serta berkehendak untuk mengelola diri sendiri.

Penerapan prinsip independensi BMT Al-Iqtishady adalah dalam operasionalnya para anggota melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing seperti di bagian *Customer Service* tugasnya apa, pendanaan bagiannya apa dan memang semua karyawan harus menjalankan kegiatannya sesuai tupoksi masing-masing. Adapun mengenai lempar tanggung jawab disini tidak sepenuhnya dalam artian bisa saling membantu sesama anggota dengan catatan tugas kita sendiri sudah selesai, misalkan di bagian *Customer Service* membantu dibagian pendanaan walaupun memiliki pengetahuan yang tidak banyak.⁷³

5. Fairness (kewajaran dan kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses

⁷³ Sundisiah. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 29 Maret 2023. 10:00.

terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu, perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.⁷⁴ Berikut penerapan kewajaran pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram adalah sebagai berikut:

- 1) Fairness atas Perlakuan Anggota

Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.⁷⁵ Perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan. BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT selalu memberikan pelayanan yang sama kepada semua anggota yang ada tanpa membeda-bedakan antara anggota yang satu dengan yang lainnya mengenai hak anggota. Dalam prinsip ini harus setara dalam segala hal, baik itu dari pelayanan anggota ataupun perlakuan kepada sesama anggota.⁷⁶

Dalam koperasi hak-hak anggota koperasi tercantum dalam pasal 6 Keputusan Pengurus Nomor 01/KEP/Kop/2021 tentang Peraturan khusus usaha simpan pinjam koperasi.

Adapun hak anggota koperasi adalah sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 64-65.

⁷⁵ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dakan Industry Manufaktur Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 64-65.

⁷⁶ Arfianil. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 5 Juni 2023. 10:00.

- a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota
 - b) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
 - c) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar
 - d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta
 - e) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
 - f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut dalam anggaran dasar.
- 2) Kesempatan Menyampaikan Pendapat

Dalam koperasi mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat, baik diminta atau tidak diminta yang terdapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoprasian. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Dalam prinsip ini BMT Al-Iqtishady memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Adapun hak untuk bersuara mengemukakan pendapat bisa dilakukan pada saat rapat evaluasi dan RAT yang diadakan setiap tahun.⁷⁷

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara yaitu, BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram sudah menerapkan prinsip GCG dengan cukup baik dilihat dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.

⁷⁷ Arfianil. *Wawancara*, KSU BMT Al-Iqtishady, 29 Maret 2023. 16:10.

B. Kendala Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

Kendala dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Setiap lembaga tentu memiliki kendala dalam menjalankan operasionalnya, begitu juga di BMT Al-Iqtishady. Dalam menjalankan operasionalnya kendala maupun hambatan yang dialami oleh BMT Al-Iqtishady adalah masalah faktor internal yaitu kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman SDM tentang prinsip-prinsip GCG. Hal ini yang menyebabkan terjadinya masalah dalam penerapannya. Selain itu, kekurangan tenaga kerja yang di mana saya selaku bagian pendanaan yang beranggotakan satu orang mengalami kesulitan saat sedang menjalankan tugas. Hal ini, berkaitan dengan salah satu prinsip GCG yaitu prinsip akuntabilitas. Selain itu, tampak pada kedisiplinan karyawan yang naik turun. Hal ini, disebabkan oleh tidak adanya aturan yang pasti yang dapat dijadikan pegangan. Secara tidak langsung ketentuan-ketentuan mengenai GCG pada koperasi ini khususnya belum ada”.⁷⁸ Jadi kendala diatas merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi. Ini adalah tantangan bagi BMT Al-Iqtishady untuk terus melakukan perbaikan. Untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Membangun Tata kelola perusahaan yang baik menurut prinsip-prinsip GCG perusahaan perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan (GCG) yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan, yaitu Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Keterbukaan (*transparency*), Kemandirian (*independency*) serta Kewajaran (*fairness*)

⁷⁸ Sundusiah. *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady, 29 Maret 2023. 10:00.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti paparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram. Pada BMT Al-Iqtishady dalam menjalankan operasionalnya dengan cara menerapkan 5 prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan kesetaraan. (1) Tansparansi dimana segala bentuk informasi, baik yang berkaitan dengan perusahaan, laporan keuangan dan bentuk transaksi dengan nasabah dalam pelayanan yang diinformasikan dengan baik dan jelas, kecuali mengenai rahasia BMT hanya untuk orang atau lembaga tertentu yang mengetahuinya. (2) Akuntabilitas menetapkan tanggung jawab dan pembagian tugas yang jelas untuk semua pengelola BMT. (3) Responsibilitas pada BMT ini diterapkan pada semua aspek operasionalnya, pengelola BMT bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tidak ada tekanan dan dominasi dari pihak mana pun serta tidak memihak satu sama lain. (4) Independensi yang dimana dilihat dari segala aspek operasionalnya seperti dalam pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak lain dan terbebas dari benturan kepentingan baik itu berkaitan dengan kepentingan diri sendiri atau lainnya. (5) *Fairness* dilihat dari pengelola BMT memberikan perlakuan yang sama kepa da semua anggota tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip GCG pada BMT Al-Iqishady. Untuk kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip GCG mengalami kendala di faktor internal yaitu tampak pada kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman SDM tentang prinsip-prinsip GCG dan tata tertib serta kedisiplinan karyawan yang naik turun. Adapun di faktor internal terkait aturan pelaksanaan GCG pada koperasi belum ada.

B. Saran

Pada penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian sangat banyak kekurangan didalam penelitian ini. Sehingga peneliti memberikan saran agar selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti yang serupa.

1. Bagi pihak BMT

Bagi pihak BMT yaitu diharapkan penerapan prinsip-prinsip GCG dapat ditingkatkan lagi agar tingkat kepercayaan anggota dan calon anggota lebih meningkat. Selain itu, BMT Al-Iqtishady sebaiknya menambah SDM sesuai dengan bidang yang dibutuhkan supaya tidak terjadi adanya perangkapan *Job* dalam menjalankan operasionalnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti objek yang sejenis, hendaknya dapat memperluas penelitiannya dengan menambah atau mengurangi variable lainnya yang ada kaitannya dengan penerapan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Ainul Arofah, “Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. BPRS Tulen Amanah”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Agustus 2020.
- Andrew Mikha Pasorong, “Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perbankan (Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk)”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin, 2012).
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (: Kencana, 2017).
- Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2004).
- Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance*. (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015).
- Gusti Ayu Asri Pramesti dan Daniel Raditya Tandio, “ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI DI KOTA DENPASAR”, *Jurnal Riset Akuntansi*, September 2018.
- Hendrik Manossoh, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. (Manado: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016).

- Imroatus Sholiha, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo", *Jurnal Lisan Al-Han*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021.
- Isnari Budiarti, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Dunia Perbankan", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 8, No. 2.
- Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 04/KB/M. KUKM/111/2020 Tentang Kerjasama dalam Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengan.
- Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 02, 2020.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Luh Gede Diah Ary Pradnyaswari dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Koperasi Di Kabupaten Klungkung", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 14, No. 2, Februari 2016.
- Masnun, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2022.
- Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep Good Corporate Governance Dalam Industri Manufaktur Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2019).

Siti Munawaroh, “Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada KSPPS BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Slawi”. (*Skripsi*, Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, 2020).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Thereza Michiko Labesi, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado”, *Jurnal Emba*, Vol. 1, No. 4, Desember 2013.

Website

<https://www.bmtaliqtishady.com/692-2/>

Wawancara

Sundusiah. *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram, 30 Maret 2023 Pukul 10:00 WIB.

Fauzi, *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram, 5 Juni 2023 Pukul 10:00 WIB.

Arfianil, *Wawancara*, BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram, 5 Juni 2023 Pukul 16:00 WIB.

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Data Informan 1

Nama : Sundusiah
Posisi : Customer Service
No Hp : 0878655550011
Alamat : Perumahan Mahkota Bertais

Tabel 2:1

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

No	Pertanyaan dan Jawaban
1	<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi dalam Mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p> <p>Jawaban: Berbicara mengenai transparansi, BMT Al-Iqtishady sudah memberikan keterbukaan dalam artian misalkan ada anggota yang mau menyalurkan dananya di sini, ada memang sebagian-sebagian yang untuk produk simpanan itu yang sistemnya, yang pertama produk simpanan yang memang kita <i>pure</i> untuk menggunakan akad titipan otomatis dia tidak mendapatkan bagi hasil, cuman ada memang nasabah yang mempunyai jumlah dana yang cukup besar, misalkan permintaan dari setiap nasabah misalkan dia punya dana sampai 200.000.00 juta, yang 200.000 juta ini dia simpan dalam artian kalau memang ada anggota yang melakukan pembiayaan bisa menggunakan dana itu tapi dengan syarat harus ada persetujuan dari yang punya dana, jadi tidak langsung kita pakai otomatis harus kita transparan ke dia entah dananya digunakan untuk apa, nilainya seberapa dan dia dapatnya seberapa.</p>
2	<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p>

	<p>Jawaban: Dilihat dari prinsip akuntabilitas ini perusahaan atau lembaga pastinya mempunyai rincian tugas dan tanggung jawab, seperti di bagian Customer Service tugasnya apa, pendanaan bagiannya apa dan memang semua karya harus menjalankan sesuai tupoksi masing-masing. Kita juga bisa saling membantu sesama anggota dengan catatan tugas kita sendiri sudah selesai, misalkan saya di bagian Custumr Service membantu dibagian pendanaan walaupun pengetahuan saya tidak banyak.</p>
3	<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Responsibilitas dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p> <p>Jawaban: BMT Al-Iqtishady telah menerapkan prinsip ini dengan baik. Menetapkan tanggung jawab dan pembagian tugas yang jelas untuk semua pengelola BMT.</p>
4	<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Independensi dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p> <p>Jawaban: BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tidak ada tekanan dan dominasi dari pihak mana pun serta tidak memihak satu sama lain.</p>
5	<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Kewajaran dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p> <p>Jawaban: BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT selalu memberikan pelayanan yang sama kepada semua anggota yang ada tanpa membeda-bedakan antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Dalam prinsip ini harus setara dalam segala hal, baik itu dari pelayanan nasabah atau pun perlakuan kepada sesama anggota</p>

6	Apa Saja Kendala/Hambatan Yang di Alami Selama Menerapkan Prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?
	Jawaban: Bahwa kendala dalam menerapkan prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady tampak pada tata tertib dan kedisiplinan karyawan yang naik turun. Ada dua faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan prinsip GCG ini yaitu faktor internal dan eksternal. Pada BMT Al-Iqtishady tidak ada faktor eksternal yang menjadi kendala dalam menerapkan prinsip GCG. Akan tetapi kendala itu muncul dari faktor internal, yaitu kendala yang muncul dari dalam lembaga itu sendiri. Seperti pasang surutnya tata tertib dan kedisiplinan para pegawai dalam mengelola BMT.



Data Informan 2

Nama : Muhammad Fauzi
Posisi : Manajer Pendanaan
No Hp : 0878655550011
Alamat : Terara Lotim

Tabel 1:2

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

No	Pertanyaan dan Jawaban
1	Bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi dalam Mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?
	Jawaban: BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT menyediakan layanan tatap muka yang dilayani langsung oleh Customer Service pada waktu jam kerja. Selain itu BMT Al-Iqtishady juga menyediakan layanan berupa web yang langsung bisa di akses oleh anggota BMT. Web ini digunakan BMT Al-Iqtishady untuk memudahkan anggota mendapatkan informasi tentang BMT Al-Iqtishady.
2	Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?
	Jawaban: Dalam menerapkan prinsip ini BMT al-Iqtishady menjalankan tugas dan tanggung jawab dan bekerja sesuai tupoksi asing-masing.
3	Bagaimana Penerapan Prinsip Responsibilitas dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?
	Jawaban: pengelola BMT bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tidak ada tekanan dan dominasi dari pihak mana pun serta tidak memihak satu sama lain.

4	<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Independensi dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p>
	<p>Jawaban: BMT Al-Iqtishady ini sudah dilaksanakan dari awal berdirinya BMT Al-Iqtishady, kemandirian yang diterapkan dari segala aspek operasionalnya seperti dalam pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak lain dan terbebas dari benturan kepentingan baik itu berkaitan dengan kepentingan diri sendiri atau lainnya, karena BMT Al-Iqtishady sadar itu sama saja menyalahi peraturan yang ada.</p>
5	<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Kewajaran dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p>
	<p>Jawaban: BMT Al-Iqtishady selalu memperhatikan segala yang terkait. Seperti dalam bentuk pelayanan kepada anggota, memberikan kesempatan para jajarannya untuk mengeluarkan pendapat, tanpa membeda-bedakannya dari segi apapun dalam segala sudut aspeknya, dalam kewajaran bagi SDM yang ada pula BMT Al-Iqtishady tidak membeda-bedakannya.</p>
6	<p>Apa Saja Kendala/Hambatan Yang di Alami Selama Menerapkan Prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p>
	<p>Jawaban: Kendala yang dialami BMT Al-Iqtishady selama menerapkan prinsip GCG yaitu tampak pada kurangnya Sumber Daya Manusia. Jadi kita sebenarnya mengalami kekurangan tenaga kerja yang di mana saya selaku bagian pendanaan yang beranggotakan satu orang mengalami kesulitan saat sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab</p>

Data Informan 3

Nama : Arfianil
Posisi : Teller
No Hp : 0878655550011
Alamat : Lombok Barat

Tabel 2:2

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

No	Pertanyaan dan Jawaban
1	<p data-bbox="312 681 1118 755">Bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi dalam Mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p> <p data-bbox="312 794 1118 1116">Jawaban: BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dengan baik. Bentuk transparansi BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram ini dimana segala bentuk informasi, baik yang berkaitan dengan perusahaan, laporan keuangan dan bentuk transaksi dengan nasabah dalam pelayanan yang diinformasikan dengan baik dan jelas, kecuali mengenai rahasia BMT hanya untuk orang atau lembaga tertentu yang mengetahuinya.</p> <p data-bbox="312 1155 1118 1271">Penerapan transparasi di BMT yaitu dengan menerapkan transparansi atas informasi yang terkait dengan produk perusahaan</p>
2	<p data-bbox="312 1311 1118 1385">Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p> <p data-bbox="312 1423 1118 1617">Jawaban: BMT Al-Iqtishady dalam menerapkan prinsip ini adalah dalam operasionalnya BMT mempunyai legalitas hukum dan patuh terhadap aturan-aturan dinas koperasi dengan cara melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Jadi BMT Al-Iqtishady rutin melakukan RAT setiap tahun. Kemudian bentuk</p>

	tanggung jawab sosial dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanan
3	<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Responsibilitas dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p> <p>Jawaban: Hal yang dilakukan BMT Al-Iqtishady dalam menerapkan prinsip ini adalah dalam operasionalnya BMT mempunyai legalitas hukum dan patuh terhadap aturan-aturan dinas koperasi dengan cara melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Jadi BMT Al-Iqtishady rutin melakukan RAT setiap tahun. Kemudian bentuk tanggung jawab sosial dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanan.</p>
4	<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Independensi dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p> <p>Jawaban: BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tidak ada tekanan dan dominasi dari pihak mana pun serta tidak memihak satu sama lain</p>
5	<p>Bagaimana Penerapan Prinsip Kewajaran dalam mengelola Manajemen Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p> <p>Jawaban: BMT Al-Iqtishady sudah menerapkan prinsip ini dimana pengelola BMT selalu memberikan pelayanan yang sama kepada semua anggota yang ada tanpa membedakan antara anggota yang satu dengan yang lainnya.</p>
6	<p>Apa Saja Kendala/Hambatan Yang di Alami Selama Menerapkan Prinsip GCG pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram?</p> <p>Jawaban: Kendala yang dialami BMT Al-Iqtishady selama menerapkan prinsip GCG yaitu tampak pada kurangnya</p>

	Sumber Daya Manusia dan ketaatan para kaeryawan dalam mengelola BMT.
--	--



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2: Dokumentasi



Gambar 2.2



Gambar 2.5



Gambar 2.6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Siti Rauhun
NIM : 190502099
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat Tanggal Lahir : Batu Mulut, 01 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Batu Mulut, Bondar
Nomor Hp : 087857907119
Email : stirauhun@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Barebelek
MTS : MTS Nurul Hakim Kediri
SMA : SMAN 4 PRAYA

C. Riwayat Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Praya, 21 Oktober 2023

(Siti Rauhun)

Lampiran 4: Kartu Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Rauhun
NIM : 190502099
Pembimbing I : Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag.
Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
7/06-23	Tambahkan di bagian teori (GCG menurut aturan) dan di bagian Pembahasan.	f
5/07-23	apabila GCG tidak diadil dan tidak harus hukum & bulat, tidak banyak di sebut	f
	→ Ciri Ketenakan (aturan/buku) H/S GCG	f
28/08-23	Tambahkan Pembahasan tentang Prinsip-prinsip GCG	f
18/09-23	Tambahkan Pembahasan ttng Prinsip GCG	f
20/09-23	Ace silah kan muraqabah	f

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing I


Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag.
NIP. 196505141997031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 621298-623809 Fax. (0376) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Rauhun
NIM : 190502099
Pembimbing II : Didi Suwardi M.Sc
Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BMT Al-
Iqtishady PAGESANGAN MATARAM

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
09/05-23	Lengkapi Cover, Daftar isi, Abstrak, Daftar tabel, dan Dokumentasi.	
	Tambahkan Responden dan pembahasan.	
7/6-23	Tambah lampiran nya	
15/06-23	Abstrak → Tambahkan tujuan Penelitian.	
16/06-23	ACC STRIP	

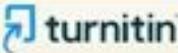
Mengetahui,
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing II

Didi Suwardi M.Sc
NIP. 0825088501

Lampiran 5: Bukti Hasil Plagiasi dan Sertifikat Bebas Pinjam



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No.2750/Un.12/Pepus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SITI RAUHUN
190502099
FEBIIPS
Dengan Judul SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BMT AL-IQTISHADY
PAGESANGAN MATARAM**

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin
Similarity Found : 18 %
Submission Date : 21/09/2023



UPT Perpustakaan
Mataram
M. Hum
197808282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No.2323/Un.12/Pepus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SITI RAUHUN
190502099
FEBIIPS

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



UPT Perpustakaan
Mataram
M. Hum
197808282006042001

Lampiran 6: Surat Balasan Penelitian

 **KSU BMT AL-IQTISHADY**
BADAN HUKUM No. 518/264/BH/XXVIII/DINAS KOPERASI UMKM/II/2012
Komplek Ruko Pagesangan Jalan Gajah Mada No. 8 Pagesangan
Kec. Mataram Kota Mataram NTB (0370) 642691
Email : ksu.bmt.iqtishady@gmail.com 

Nomor : 036/SBHP/BMT/X/2023
Lamp :
Hal : Balasan Surat Izin Penelitian

Mataram, 24 Oktober 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mataram
Di Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Surat izin penelitian yang diajukan kepada lembaga kami oleh mahasiswa atas nama:

Nama : Siti Raubun
NIM : 190502099
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada BMT Al-Iqtishady Mataram

Melalui surat ini kami menerangkan bahwa mahasiswa atas nama tersebut telah diizinkan untuk melakukan penelitian skripsinya di KSU BMT Al-Iqtishady sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian surat balasan izin penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perpustakaan UIN Mataram
Hormat Kami,


M. Syafriyadi, SE
Manajer